

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH SECARA TERPADU
DI KELURAHAN BATARAGURU
KECAMATAN WOLIO
KOTA BAU-BAU**

*The Community's Participation in Combined Solid Waste
Management in Bataraguru District Wolio Regency Bau-Bau City*

LA ODE MUH. YUSUF HIBALI



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERKOTAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH SECARA TERPADU
DI KELURAHAN BATARAGURU
KECAMATAN WOLIO
KOTA BAU-BAU**

Tesis
Sebagai Salah satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Manajemen Perkotaan

Disusun dan diajukan oleh

LA ODE MUH. YUSUF HIBALI

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2 0 0 6**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH SECARA TERPADU
DI KELURAHAN BATARAGURU
KECAMATAN WOLIO
KOTA BAU-BAU**

Disusun dan diajukan oleh

**LA ODE MUH. YUSUF HIBALI
Nomor Pokok P 1300203524**

**Menyetujui
Komisi Penasehat**

Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, M.Sc

Ketua

Prof. Dr. H.M. Syahrul, M.Agr.

Anggota

**Ketua Program Studi
Manajemen Perkotaan**

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin**

Ir. Bambang Heryanto, M.Sc., Ph.D.

Prof. Dr. Ir. M. Natsir Nessa, M.S

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun tesis yang berjudul “ *Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Sampah Secara Terpadu di Kelurahan Batarguru Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau*, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Pascasarjana Program Studi Manajemen Perkotaan Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penyusunan tulisan ini telah ditemukan berbagai kendala, terutama keterbatasan yang melekat pada diri Penulis. Namun berkat bimbingan dari Prof. D. Ir. Mary Selintung, M.Sc dan Prof. Dr. H.M. Syahrul, M.Agr maka kendala-kendala yang ada dapat diatasi, selain itu Penulis pada kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Mz. Amirul Tamim, M.Si selaku Walikota Bau-Bau yang telah memberikan izin dan membantu seluruh biaya perkuliahan pada Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Perkotaan Universitas Hasanuddin sampai selesai.
2. Prof. Dr. Ir. M. Natsir Nessa, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Ir. Bambang Heryanto, M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Manajemen Perkotaan Universitas Hasanuddin Makassar.

4. Bapak dan Ibu dosen penguji serta segenap karyawan Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Rekan-rekan mahasiswa, para sahabat serta semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, tesis ini penulis persembahkan kepada istri dan anak-anak tercinta atas segala pengorbanan, kasih sayang dan motivasi yang senantiasa diberikan pada penulis.

Penulis menyadari sebagai makhluk ciptaan Al-Khalik senantiasa diliputi kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, segala urusan selayaknya disandarkan kepada-Nya dan penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat.

Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, Februari 2006

Penulis

ABSTRAK

La Ode Muh. Yusuf Hibali. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Secara Terpadu Di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau.* Di bawah Bimbingan Mary Selintung dan Syahrul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu guna menjaga kebersihan Kelurahan Bataraguru secara berkelanjutan dan untuk menjelaskan sistem kelembagaan formal dan mekanisme pengelolaan sampah di kelurahan Bataraguru. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subyek penelitian yakni masyarakat di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio yang terdiri dari 4 RK dalam 1428 KK (Sumber, Kantor Kelurahan Bataraguru). Sampel ditetapkan 10% dari populasi, sehingga diperoleh sampel penelitian sebesar 143 KK. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif dengan analisis tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Bataraguru dalam kegiatan pengelolaan sampah dapat dilihat dari beberapa tahap yakni (1) tahap pengumpulan, (2) tahap pemisahan dan memasukkan dalam kantong plastik dan disimpan didepan rumah masing-masing, (3) tahap pembuangan akhir yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Bau-Bau. Sistem dan Mekanisme kerja pengelolaan sampah dilakukan oleh lembaga formal, yaitu dari Dinas Kebersihan Kota Bau-Bau bekerjasama dengan camat, lurah juga lembaga-lembaga formal lainnya seperti Dinas Kesehatan, Organisasi PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Posyandu dalam memberikan penyuluhan.

ABSTRACT

La Ode Muh. Yusuf Hibali. *The Community's Participation in Combined Solid waste Management in Bataraguru District Wolio Regency Bau-Bau City. (Supervised by Mary Selintung and Syahrul).*

The aim of study is to identify the community's participation in integrated solid waste management in order to continually maintain Bataraguru District's Cleanliness and describe formal institute system and solid waste management mechanism in Bataraguru district. The method used for this study was descriptive qualitative with population taken from residence living in Bataraguru District Wolio Regency consisting of 4 RK with 1428 K (source Bataraguru District office), where only 10 % (143 KK) was taken for sampling, with cross tabulation analysis method. The result showed that the community's participation for solid waste management activity in Bataraguru District could be seen in a couple of levels, including (1) collection level, (2) solid waste separation, disposing into plastic bags and storing it in front of each houses and (3) final disposal done by the Municipal Cleaning Department of Bau-Bau City. The solid waste management system and mechanism was operated by formal institute, namely Municipal Cleaning Department of Bau-Bau City, working together with government officials in district and regional offices also with other institutes such as Health Department, PKK Organization, Dharma wanita, Dharma Pertiwi and Posyandu in giving discrimination.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Lingkup Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Partisipasi Masyarakat dan Faktor Yang Mempengaruhi	9
B. Sampah dan Sistem Pengelolaannya	15
C. Sampah dan Sistem Pengelolaan Kebersihan Lingkungan	22
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
F. Defenisi Operasional	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Karakteristik Responden	41
C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Secara Terpadu di Kelurahan Batarguru	48
D. Sistem dan Mekanisme Kerja Kelembagaan Formal Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bataraguru	53
E. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Sampah	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	halaman
1. Distribusi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kelurahan Batarguru, Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, Tahun 2004	38
2. Jenis Truk yang Digunakan dalam Proses Pengangkutan Sampah di Kota Bau-Bau	39
3. Jumlah Sampah Yang Ada di Kelurahan Bataraguru	40
4. Tingkat Pendidikan Responden	42
5. Mata Pencaharian Responden	43
6. Tingkat Pendapatan Responden	44
7. Jumlah Tanggungan Responden	45
8. Status Tinggal Responden	45
9. Luas Pekarangan Responden	46
10. Keaktifan Responden dalam Kegiatan Sabtu Bersih	47
11. Penampungan Pertama Berupa Sisa Sayuran dan Makanan	49
12. Pembuangan Sampah Berupa Kertas, Plastik dan Sejenisnya	50
13. Pembuangan Sampah Berupa Botol, kaleng dan Sejenisnya	51
14. Tempat Pembuangan Sampah Berupa Daun-Daunan, Ranting dan Sejenisnya	52
15. Penyuluhan Kebersihan Lingkungan dari Dinas Kebersihan Kota Bau-Bau	54

16. Penyuluhan Kebersihan Lingkungan dari Aparat Kecamatan dan Kelurahan	55
17. Penyuluhan Kebersihan Lingkungan dari Dinas Kesehatan	56
18. Penyuluhan Kebersihan Lingkungan dari Organisasi PKK	57
19. Penyuluhan Kebersihan Lingkungan dari Organisasi Lainnya	58

DAFTAR GAMBAR

Nomor	halaman
1. Kerangka Pikir	31

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	halaman
1. Skema Pengolahan Sampah di Kelurahan Bataraguru	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia secara umum telah menggalakkan pembangunan di segala bidang dan pada pelaksanaannya telah melahirkan kota-kota dengan perkembangan yang cukup pesat, salah satu diantaranya adalah Kota Bau-bau yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001. Namun sebagai konsekuensi dari perkembangan sebuah kota, maka akan ditimbulkan berbagai permasalahan yang terkadang sulit dikendalikan, antara lain pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali sehingga akan berpengaruh terhadap daya dukung lahan perkotaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya menyangkut sistem pengelolaan kebersihan kota.

Pertumbuhan dan perkembangan kota merupakan peningkatan aktifitas baik jumlah penduduk maupun perkembangan pembangunan yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah seperti berkurangnya tingkat kelayakan lingkungan permukiman masyarakat dan semakin sulitnya penanganan masalah sampah. Ini terjadi karena penambahan jumlah penduduk yang menyebabkan ruang, sumber-sumber sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas pelayanan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktifitas semakin berkurang dan terbatas.

Perkembangan kota yang pesat disertai dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pola konsumsi penduduknya semakin tinggi, sehingga proses timbunan sampah bertambah pula. Besarnya timbunan sampah dari suatu komunitas masyarakat perkotaan, sudah menjadi hal yang umum dihadapi oleh hampir seluruh kota yang ada di Indonesia, termasuk didalamnya Kota Bau-Bau. Penanganan masalah persampahan dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat dibutuhkan suatu program pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Program kebersihan lingkungan permukiman, utamanya dari sampah merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit, oleh karenanya penanganannya memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah yang didukung oleh partisipasi masyarakat.

Pembangunan yang telah dilakukan selama ini telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di kelurahan Bataraguru untuk meningkatkan terus kemampuan daya beli masyarakat yang terus mengalami kenaikan, sehingga bertambah pula konsumsi baik kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum hal ini menunjukkan taraf hidup nay semakin baik, namun dilain pihak hal ini menimbulkan meningkatnya timbunan sampah.

Sa'id (1987) mengemukakan bahwa masalah penanganan sampah ternyata tidak mudah, melibatkan banyak pihak, memerlukan teknologi, memerlukan dana yang cukup besar serta di butuhkan keinginan yang kuat untuk melaksanakannya. Bila penanganan maslah sampah hanya diharapkan

dari pihak pemerintah Kota, maka tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal sehingga keterlibatan dan partisipasi pemukiman sangat dibutuhkan.

Oleh karena, pemerintah kota memiliki keterbatasan baik sumber daya maupun sumber dana dalam pengelolaan persampahan, maka dapat berimplikasi pada penurunan kualitas pelayanan penanganan sampah. Hal ini, disebabkan kurang mampunya mengimbangi peningkatan timbunan sampah yang ditimbulkan oleh peningkatan aktifitas penduduk kota itu sendiri, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat baik secara alamiah maupun karena urbanisasi, kemajuan teknologi, meningkatnya berbagai kegiatan komersil seperti perdagangan dan pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan semakin bertambah kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan sampah kota. Umumnya perkotaan di Indonesia terdiri dari 73% sampah yang terdiri dari bahan organik atau sisa sayuran, sisanya terdiri dari kertas, plastik, logam dan sebagainya (Menteri Negara KLH, 1992).

Pada dasarnya, penanganan sampah merupakan tanggung jawab setiap penduduk yang bermukim di daerah tertentu, tetapi menurut Struktur Pemerintah Daerah Tingkat I, dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 disebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab untuk pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang persampahan adalah ditangani oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, kemudian wewenang dan tanggung jawab kepada Dinas Kebersihan Kota.

Ketika diamati dari berbagai rujukan, masalah sampah sebenarnya berjalan seiring dengan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Semakin maju tingkat penguasaan teknologi dan industri, serta semakin maju suatu kebudayaan suatu masyarakat, diduga sampah yang dihasilkan semakin meningkat juga.

Berkaitan dengan program kebersihan lingkungan permukiman, Pemerintah Kota Bau-Bau selama ini telah melaksanakan berbagai upaya, baik yang bersifat tindakan mulai dari pengumpulan dengan penyediaan tempat pembuangan sementara (TPS) sampai pada pengangkutan ketempat pembuangan akhir (TPA), maupun upaya lain yang bersifat ketentuan-ketentuan melalui suatu aturan tentang pengelolaan persampahan. Dan ditunjang pula dengan penyiapan armada angkutan sampah, TPS Komunal dan Penyiapan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun upaya-upaya tersebut nampaknya masih sulit dan belum mampu untuk mengatasi masalah kebersihan lingkungan permukiman, tanpa didukung oleh partisipasi dari masyarakat.

Pada dasarnya sistem pengelolaan sampah di kelurahan Bataraguru telah dilakukan sesuai dengan mekanisme kerja, yaitu telah melibatkan lembaga-lembaga yang terkait seperti Dinas Kebersihan Kota Bau-Bau, bekerja sama dengan camat dan lurah setempat, hanya saja partisipasi masyarakat untuk ikut serta secara utuh dalam pengelolaan sampah kurang memadai, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut

bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, ditunjang pula rendahnya intensitas penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam proses pengelolaan sampah, sehingga sebagian besar masyarakat di Kelurahan Bataraguru dalam proses pengelolaan sampah biasanya dilakukan dengan mengumpulkan sampah di depan rumahnya bukan di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota Bau-Bau.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bau-Bau diketahui bahwa terdapat 130-150 m³ timbunan sampah dan yang dapat tertangani sekitar 95-115 m³. Di kelurahan Bataraguru dijumpai jumlah timbunan sampah berkisar antara 28-30 m³, yang tertangani oleh Pemerintah setempat (Dinas Kebersihan) Kota Bau-Bau sebesar 15-20 m³ perhari (Retribusi Pelayan Persampahan/ Kebersihan 2005)

Secara umum proses pengelolahan sampah yang sering dilaksanakan selama ini adalah sebagai berikut : (1) *Pengumpulan*, yaitu suatu bentuk pengelolahan sampah dengan menggunakan gerobak sampah yang selanjutnya dibawa ke TPS, (2) *Pengolahan*, yaitu pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah sampah dengan cara daur ulang dan pengomposan, (3) *Pengangkutan*, yaitu pengelolaan sampah yang secara umum dimulai dari TPS ke TPA, dan (4) *Pembuangan Akhir*, yaitu pengelolaan sampah di TPA (Murthaco, 1995 : 11).

Kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam pengelolaan sampah tersebut belum optimal, hal ini terlihat oleh beberapa hambatan dalam sistem pengelolaan sampah khususnya di kelurahan Bataraguru seperti belum tersedianya tempat sampah secara merata, masih kurangnya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam penanganan sampah, sarana / prasarana menunjang seperti jalan dan kendaraan angkutan yang belum memadai untuk melayani masyarakat yang bermukim di kelurahan Bataraguru.

Berangkat dari uraian tersebut diatas, penulis mencoba melibatkan dan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah khususnya di kelurahan Bataraguru secara terpadu yang melibatkan komponen pemerintah, partisipasi pengusaha, koperasi, serta masyarakat itu sendiri yang bermukim di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

Dengan dasar uraian pada latar belakang, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu guna menjaga kebersihan kelurahan Bataraguru secara berkelanjutan ?
2. Bagaimana sistem kelembagaan formal dan mekanisme pengelolaan sampah di kelurahan Bataraguru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu guna menjaga kebersihan kelurahan Bataraguru secara berkelanjutan.
2. Untuk menjelaskan sistem kelembagaan formal dan mekanisme pengelolaan sampah di kelurahan Bataraguru.

D. Manfaat Penelitian

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi :

1. Masukan bagi Pemerintah Kota Bau-Bau, khususnya dalam pengelolaan sampah yang ada di kelurahan Bataraguru, agar supaya tidak mencemari lingkungan.
2. Masukan bagi warga di kelurahan Bataraguru agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan huniannya.
3. Bahan acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi dan kajian lanjutan tentang masalah persampahan

E. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini terbatas pada partisipasi masyarakat di kelurahan Bataraguru dalam pengelolaan sampah dan penentuan sistem dan mekanisme pengelolaan sampah yang melibatkan kelembagaan formal di Kelurahan Bataraguru.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, leingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, memuat tinjauan pustaka dan Kerangka Pikir.

BAB III, merupakan bab metodologi penelitian, yang berisi tempat penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis dan defenisi operasional.

BAB IV, berisi gambaran umum objek penelitian dan hasil analisis pembahasan.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat dan Faktor yang Mempengaruhi

Partisipasi masyarakat merupakan kerjasama atau bentuk interaksi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh beberapa individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan. Karena itu partisipasi sejak semula sudah dianggap menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan nasional dan secara konsisten selalu tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang, tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri (Mubyarto, 1984). Davis (1990) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan secara mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok sebagai wahana memberi sumbangsih terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.

Dalam kaitan dengan pengelolaan kebersihan lingkungan permukiman, partisipasi diartikan sebagai kesadaran, keikutsertaan penghuni atau warga dalam melaksanakan kegiatan, akan pula menimbulkan rasa tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga merosotnya kebersihan lingkungan permukiman, Hardjoeno (1992) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan standar yang mengikutsertakan baik jiwa raga maupun harta benda untuk

mendukung terlaksananya suatu kegiatan tertentu baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa ahli dalam memberikan pemahaman tentang partisipasi selalu dikaitkan dengan pembangunan dalam arti bahwa bagaimana partisipasi diupayakan dapat mendukung program pemerintah mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Partisipasi tidak hanya untuk tingkat lokal seperti turut serta, bersama atau individu dalam proyek pemerintah atau tidak hanya dalam hubungan produksi, pengambilan keputusan dan pelaksanaan, tetapi harus lebih luas (Hanafiah, 1982)

Dari berbagai rumusan yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi pada dasarnya mengandung makna :

1. Adanya keterlibatan mental dan emosi seseorang yang berpartisipasi,
2. Adanya kesediaan seseorang untuk memberikan kontribusi, aktifitas dan kegiatan lainnya yang membantu pencapaian tujuan.
3. Menyangkut kegiatan-kegiatan dalam usaha kehidupan kelompok atau komunitas dalam masyarakat, dan
4. Adanya rasa tanggung jawab terhadap aktifitas yang dilakukan seseorang.

Berkaitan dengan partisipasi tersebut, maka terdapat beberapa alasan pentingnya partisipasi masyarakat yaitu :

1. Rakyat adalah fokus sentral tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan baik arus informasi tentang aspirasi kebutuhan dan kondisi daerah tanpa keberadaannya tidak akan terungkap.
3. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat.
4. Partisipasi merupakan cara efektif membangun guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
5. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak individual (Tjokrowinoto : 1987).

Untuk menilai dan mengukur partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah, maka yang pertama-tama harus di pahami adalah faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi itu sendir, karena kita ketahui bahwa partisipasi bukan hanya ikut serta secara fisik, namun juga secara kejiwaan. Davis (1990) mengatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan pikiran serta perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untk memberikan sumbangan atau bantuan kepada kelompok yang mendorongnya untk memberikan sumbangan atau bantuan kepada kelompok tersebut, guna mencapai tujuan bersama ikut bertanggung jawab terhadap usaha bersangkutan.

Menurut Silondae (2000) bahwa bentuk partisipasi dapat dilihat dari segi motivasi, artinya partisipasi masyarakat terjadi karena 3 (tiga) hal pokok yaitu :

1. Motivasi, yaitu kesadaran yang timbul karena kehendak diri pribadi anggota masyarakat, artinya masyarakat menerima dan menyadari bahwa pembangunan semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga apa yang mereka lakukan bukan karena terpaksa dan ikut-ikutan.
2. Partisipasi Ikut-ikutan, yaitu hanya didorong oleh rasa solidaritas diantara sesama anggota masyarakat dan hanya merupakan perwujudan kebersamaan.
3. Partisipasi terpaksa, yaitu suatu bentuk partisipasi yang muncul hanya karena adanya perintah dari atasan atau penguasa, sehingga masyarakat seakan akan terpaksa melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, namun mereka sesungguhnya tidak mengetahui apa tujuan rencana tersebut dan untuk siapa.

Oleh itu, membangkitkan dan mendorong partisipas masyarakat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Ramos dan Ramon dalam Silondae (2000) mengatakan bahwa ada 4 (Empat) faktor yang dipertimbangkan dalam partisipas yaitu : (1) Motivasi, (2) Kepemimpinan Masyarakat, (3) Pendekatan Belajar, dan (4) Sumber-sumber untuk

pengembangan masyarakat. Lebih lanjut Silondae mengatakan bahwa masyarakat akan bergerak untuk berpartisipasi jika :

1. Dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau ada dalam masyarakat,
2. Memberikan manfaat secara langsung kepada kegiatan masyarakat,
3. Manfaat yang diperlukan melalui partisipasi dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat dan,
4. Dalam proses partisipasi terjadi adanya kontrol keberhasilan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sementaraitu, menurut Pabeta (1992), Mubyarto (1998) dan Madrie (1986) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan dalam keberhasilan lingkungan pemukiman antara lain ditentukan oleh : Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Persepsi, Jumlah Tanggungan Keluarga dan tata cara kehidupan.

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebersihan lingkungan (terutama pengelolaan sampah), pada hakekatnya diartikan adanya sikap tanggap masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang merupakan bagian penting dalam proses pembangunan.

Lingkungan yang kotor akan menimbulkan berbagai jenis penyakit terhadap masyarakat. Dan masyarakat yang tidak sehat akan menghambat proses pembangunan. Olehnya itu salah satu indikator yang turut menentukan keberhasilan dalam menanggulangi sampah adalah perilaku

masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pembuangan sampah (Baay, 1992).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Winardi (2000 : 7) menjelaskan bahwa partisipasi berhubungan dengan motifasi. Artinya para individu bertindak karena adanya motifasi yang mendorong yang ada dalam diri sendiri, yaitu Keinginan-Keinginan (*Wants*), kebutuhan-kebutuhan (*needs*), dan perasaan takut (*fears*). Lebih lanjut Winardi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Keinginan-keinginan (*wants*) adalah dorongan yang timbul dari dalam diri manusia akan lingkungan yang bersih.
2. Kebutuhan-kebutuhan (*needs*) adalah perwujudan dari keinginan-keinginan tersebut, agar lingkungan jauh dari berbagai jenis sumber penyakit (Bau, Lalat, Kecoa, dan serangga lainnya).
3. Rasa Takut (*Fears*) adalah perasaan yang timbul akan terjangkitnya penyakit seperti tipes, kolera, dan disentri.

Dalam pengelolaan sampah jika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat merupakan tindak lanjut dari timbulnya masalah sampah dalam bentuk tanggung jawab untuk tidak membuang sampah disembarang tempat ataupun melakukan pemilihan antara sampah basah dan sampah kering bila akan membuang sampah di TPS, hal ini tentu saja akan membantu kinerja para petugas kebersihan pada saat pengangkutan ke TPA. Dalam hal ini lembaga-lembaga formal yang terkait seperti Dinas kebersihan, Dinas

Kesehatan, Kecamatan/ Kelurahan maupun Organisasi-Organisasi formal lainnya turut berperan melalui penyuluhan-penyuluhan yang diberikan secara kontinue ke masyarakat mengenai sistem pengelolaan sampah yang baik maupun pentingnya kebersihan lingkungan. Apabila semua itu ada dan terwujud dalam perilaku masyarakat terutama yang berhubungan dengan pembuangan sampah, maka pengelolaan sampah akan terlaksana dengan baik.

B. Sampah dan Sistem Pengelolaannya

Masalah sampah merupakan salah satu fenomena yang dihadapi di kota-kota besar atau daerah pemukiman yang padat, karena terus terjadi bahkan telah mencapai tahap yang mencemaskan. Emil Salim (2002) menyatakan kecemasannya terhadap masalah sampah, dimana melihat hanya sebagian kecil sampah yang dikelola (diangkut) oleh Dinas Kebersihan dengan jalan dibuang atau dipindahkan ketempat pembuangan akhir (TPA). Kecemasan itu bertambah jika kita melihat kenyataan tingginya timbunan sampah yang terdiri atas benda-benda yang sulit terdekomposisi dalam tanah, seperti botol dan kantong plastik.

Prayudi (1994) menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. Olehnya itu, dikatakan bahwa manajemen baru merupakan suatu masalah yang besar setelah faktor sumberdaya yang paling sukar

untuk dikembalikan dan didayagunakan masuk kedalam kanca karya yaitu manusia Pengertian yang di berikan oleh Aswar (1986) yang di tinjau dari ilmu kesehatan Lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat pengembangbiakan bibit penyakit, medium perantara penyebar bau, tidak menimbulkan kebakaran dan sebagainya.

Menurut Robert J. Kodoatie (1990), bahwa berdasarkan konsep manajemen pengelolaan limbah padat (sampah) perkotaan secara umum persoalan yang muncul pada pengelolaan didaerah antara lain :

1. Aspek kelembagaan ; bentuk kelembagaan yang tidak sesuai dengan besarnya kewenangan yang harus di kerjakan, sumberdaya manusia sebagai salah satu unsur pengelola kurang memadai dari jumlah kualifikasinya.
2. Aspek teknis operasioal ; keterbatasan sarana dan prasarana pengumpulan kontainer, pengangkutan, pengelolaan di tempat pembuangan akhir (buldozer, track dozer), serta terbatasnya lahan untuk pembuangan akhir, serta penanganan akhir.
3. Aspek Pembiayaan; tidak seimbangnya besar biaya operasional pemeliharaan (OP) dengan besarnya penerimaan retribusi sebagai konsekuensi logis pelayanan akibat mekanisme penarikan retribusi yang kurang memadai.

4. Aspek pengaturan ; tidak dimilikinya kebijakan pengaturan-pengaturan pengelolaam didaerah yang mampu memberikan motifasi kesadaran serta masyarakat untuk secara utuh dalam pengelolaan baik menyangkut pembiayaan dan teknis operasional.
5. Aspek peran serta masyarakat ; kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara utuh dalam pengelolaan kurang memadai, disisi lain sampah adalah merupakan akibat kegiatan dari masyarakat itu sendiri.

Latief (1984), mengatakan bahwa suatu sistem pengelolaan sampah hendaknya dapat memenuhi kriteria, yakni antara lain : (1) harus dapat menjamin terselenggaranya sanitasi lingkungan dalam rangka memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat, (2) harus dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya sekecil mungkin, (3) bentuk lokasi pembuangan akhir, harus mempertimbangkan tempat-tempat pemakaiaan ruang (*Space*) sehingga tidak mengganggu lingkungan maupun pemborosan terhadap penggunaan lahan. Untuk mencapai hal ini, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) penyimpanan sampah, (2) Pengumpulan sampah (3), pembuangan sampah dan sekaligus pemusnahan sampah (Anonim, 2003).

Cara pembuangan sampah yang merupakan salah satu aspek strategis dalam sistem pengelolaan sampah telah berbagai macam cara dipraktekkan oleh berbagai negara berkembang maupun negara maju (Ryadi, 1986). Beberapa diantaranya mengenai sistem pembuangan sampah tersebut yang dimaksud adalah;

1. *Hog Feeding*, yaitu cara pengelolaan yang dengan sengaja mengorganisir sampah jenis gerbage untuk digunakan makanan babi. Dipandang dari segi ekonomi, cara ini bukan saja menguntungkan bagi peternak babi, tetapi juga volume sampah yang tersimpan di lahan pembuangan akhir berkurang jumlahnya.
2. *Incineration*, cara ini dilakukan dengan membakar sampah secara besar-besaran dalam suatu pabrik yang khusus dibangun, yaitu volume sampah dapat diperkecil hingga sepertiga jumlahnya, tidak memerlukan lahan yang luas, tidak terpengaruh cuaca, menghasilkan sumber energi baru yang dapat dimanfaatkan dan manajemen relatif mudah dijalankan, mengingat pengaturan jam dapat lebih mudah diatur dan penggunaan tenaga kerja lebih efisien.
3. *Sanitary landfill*, cara ini menimbun sampah dengan mempergunakan tanah secara berlapis-lapis. Metode ini mempunyai keuntungan, yakni mencegah bau busuk dan sampah bebas dari bersarangnya binatang vektor yang lazimnya membawa bibit penyakit dari sampah kepada manusia. Cara ini pula memberikan dampak ekonomi untuk tanah rawa-rawa yang ditimbun. Demikian pula tanah rendah, tanah genangan air yang dapat diubah fungsinya menjadi tanah bangunan rumah, industri dan kantor.

4. *Composting*, yaitu cara pengelolaan sampah untuk keperluan pupuk tanaman. Jenis sampah bagi kebutuhan pembuatan pupuk tersebut adalah sampah organik.
5. *Discharge to sewage*, yaitu cara membuang sampah kedalam air bekas, setelah dihaluskan buangan sampahnya. Cara ini cukup efektif dan efisien sepanjang saluran atau sistem pembuangan air kotor dalam keadaan baik.
6. *Dumping*, yaitu cara meletakkan sampah diatas permukaan tanah. Praktek seperti ini banyak dikembangkan dinegara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.
7. *Landfill*, yaitu cara membuang sampah pada tempat yang rendah. Kemudian ditimbun dengan lapisan tanah. Sistem ini hampir digunakan pada setiap kota-kota besar di Indonesia.
8. *Individual incineration*, yaitu setiap orang membakar sendiri sampahnya. Sistem ini memiliki kelemahan yaitu terjadinya pencemaran udara dan hanya kebakaran, jika tidak dilakukan dengan hati-hati.
9. *Recycling*, yaitu cara ini memanfaatkan dan mengelolah kembali sebagian sampah, seperti kaleng, kertas, plastik kaca/botol dan lain sebagainya. Sistem ini menguntungkan bagi pemulung di kota-kota dan sekitarnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan.

10. Peralatan lain yang banyak digunakan adalah cara *inceneration* yakni *miscellaneous* untuk sejumlah debu secara sementara, untuk selanjutnya di buang.

Dewasa ini banyak wadah penampungan sampah yang dikembangkan dengan cara incineration, yakni ;

1. *Charge apparatus*, yaitu tempat penampungan sampah yang dapat diangkut oleh kendaraan pengangkut sampah. Tempat ini merupakan wadah penumpukan sekaligus penyatuan sehingga mudah di musnakan.
2. *The Fumase*, alat ini merupakan tungku pembakar yang dilengkapi dengan jeruji besi yang berguna untuk mengatur sampah yang dimusnahkan dan memisahkan abu dari sampahnya yang mudah terbakar.

Makkulau (1979), menyatakan ada beberapa faktor yang menimbulkan masalah sampah : (1) Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) Pengaruh pertumbuhan Penduduk, (3) Akibat kebodohan dan sikap mental. Diantara tiga faktor penyebab, faktor sikap mental inilah yang paling sukar dikendalikan, begitu pula masalah pertumbuhan penduduk karena sebagian menyangkut sikap manusia, maka ia termasuk sebagai faktor yang susah dikendalikan.

Sa'id (1987), mengemukakan bahwa ditinjau dari sumbernya ada empat jenis sampah, yaitu (1) sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari lingkungan persampahan atau perumahan, (2) sampah komersil, yaitu

sampah yang berasal dari toko, warung, restoran, pasar, atau toko swalayan, (3) sampah industri, yaitu sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri, dan (4) sampah alami dan lainnya, yaitu sampah yang berupa daun-daun, sisa bencana dan sebagainya.

Hal yang menjadi kebiasaan atau yang lumrah dilakukan pada setiap ibu Rumah Tangga, sebelum sampah mereka diangkut oleh petugas ke bersihan, maka sampah-sampah itu mereka tampung dan kumpulkan terlebih dahulu dalam suatu tempat khusus. Ada yang memanfaatkan seperti bak atau kaleng bekas sebagai wadah, atau bahkan hanya berupa tas plastik bekas. Dan ada pula yang secara khusus telah membuat bak semen di depan rumah mereka masing-masing sebagai tempat sampah yang permanen. (Apriadi, 1992).

Cara penyelesaian yang ideal dalam penanganan sampah di pertokoan adalah dengan cara membuang sampah sekaligus memanfaatkannya sehingga selain membersihkan lingkungan, juga menghasilkan kegunaan baru. Hal ini secara ekonomi akan mengurangi biaya penanganannya. (Murthado dan Said, 1987).

Solusi dalam mengatasi masalah sampah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

Cohen dan Uphof (1977) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan terbagi atas 4 tahap, yaitu; a) partisipasi dalam tahap perencanaan, b) partisipasi pada tahap pelaksanaan, c) partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, dan d) partisipasi dalam tahap pengawasan dan monitoring. Masyarakat senantiasa ikut berpartisipasi terhadap proses-proses pembangunan bila terdapat faktor-faktor yang mendukung, antara lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran, kebutuhan sarana dan prasarana, dorongan moral, dan kelembagaan baik formal maupun informal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas turun ketempat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. (Anonim, 1997).

C. Sampah dan Sitem Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Sampah sebagai salah satu masalah rumit, bukan hanya berdampak negatif terhadap berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih dan indah, melainkan juga bisa menjadi sumber penyakit, sarang lalat dan banjir akibat tersumbatnya saluran air (Therik, 1994).

Azwar (1996) mengemukakan bahwa sampah dalam pengertian ilmu kesehatan lingkungan sebenarnya hanya sebagian dari benda yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup.

Menurut Said Nur Yamin (1989), sampah adalah istilah yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Limbah cair dan limbah gas. Dari ketiga bentuk wujud ini, sampah padat adalah sampah yang lebih sering dijumpai, terdapat dimana-mana hingga kini menjadi topik hangat untuk ditanggulangnya.

Menurut Subanu (1995) menjelaskan bahwa sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sampah perkotaan adalah sampah yang timbul dikota.

Dalam kaitan dengan pengelolaan sampah. Pabeta (1992) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebersihan lingkungan yaitu antara lain :

1. Tingkat pendidikan yaitu jenjang pendidikan formal yang ditempuh seseorang.
2. Tingkat pendapatan yaitu jumlah batas jasa yang diterima seseorang dalam sebulan dinyatakan dalam rupiah.

3. Persepsi dan jumlah tanggungan keluarga yaitu tanggapan tempat tinggalnya.

Sedangkan Sai'd (1993) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan sampah adalah :

1. Faktor masyarakat, dimana masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah, karena pada hakekatnya timbulnya masalah sampah merupakan produk dari kegiatan masyarakat. Karena itu masyarakat seharusnya bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dengan cara pengelolaannya sehingga tidak mencemari lingkungannya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan tindak lanjut dari tanggung jawab tersebut. Nilai –nilai dan norma yang menghambat positif yang mendorong berpartisipasi dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan nilai-nilai dan norma-norma yang menghambat diupayakan pemecahannya. Pada akhirnya pencemaran nilai dan norma kedalam perilaku masyarakat diharapkan untuk menunjang pengelolaan sampah.
2. Faktor sampah, sampah merupakan produk dari kehidupan manusia dapat berbentuk padat, cair maupun gas. Sampah dalam kontkes sistem pengelolaan saat ini masih merupakan sampah padat.
3. Faktor organisasi dan manajemen, faktor ini merupakan upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari setiap pengelolaan sampah. Dengan organisasi dan manajemen yang tepat, maka

keterpaduan pengumpulan dan pengangkutan dengan menggunakan sarana yang ada dapat dicapai seoptimal mungkin.

4. Faktor ekonomi, faktor ini terfokus pada masalah pendanaan. Faktor pendanaan bersumber dari pemerintah dan masyarakat, titik utama dari faktor pendanaan ini diharapkan datang dari masyarakat. Karena jasa pengumpulan dan pengangkutan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebersihan. Untuk itu diperlukan, suatu tatalaksana pengumpulan retribusi yang memadai, sehingga dana yang berasal dari masyarakat terhimpun dan dikembalikan untuk pembiayaan pengelolaan sampah. Dengan demikian dana yang berasal dari pemerintah sifatnya hanya sebagai perangsang bagi terakumulasinya dana yang berasal dari masyarakat. Faktor ekonomi lain adalah analisis biaya untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan mulai dari pengumpulan, pemindahan pengangkutan dan pembuangan akhir.
5. Faktor hukum, karena negara kita negara hukum, maka segala tindakan pengelolaan sampah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Atas dasar inilah hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat diterapkan dalam organisasi pengelolaan kota. Dengan demikian landasan hukum tersebut tidak hanya merupakan suatu legalitas formal belaka tetapi harus dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan beberapa pengertian tersebut, Hartoyo (1998) dalam Sugita (2002:20) mengatakan bahwa peran serta masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah dapat dibedakan atas dua yaitu :

1. Peran serta pasif yang meliputi
 - a. Sadar akan kebersihan lingkungan dalam pengertian tidak membuang sampah sembarangan
 - b. Sadar akan kewajiban membayar retribusi kebersihan, yaitu memahami bahwa pengelolaan sampah memerlukan biaya yang sebagian perlu dibebankan kepada masyarakat.
2. Peran serta aktif yang meliputi :
 - a. Melaksanakan pengumpulan sampah dengan pola komunal
 - b. Menciptakan iklim kontrol sosial dalam pengertian saling mengingatkan sesama anggota masyarakat baik individu maupun kelompok untuk berperilaku hidup bersih.
 - c. Bergotong royong melaksanakan kerjabakti dalam kegiatan kebersihan lingkungan.
 - d. Ikut serta dalam penyediaan sarana kebersihan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang lazim dilaksanakan pada beberapa kota besar di Indonesia hingga saat ini baru sampai pada tahap pengelolaan yang meliputi proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.

Sejalan dengan itu Murtafdo (1995:11) ,menguraikan proses pengelolaan sampah sering dilaksanakan selama ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan, yaitu proses pengelolaan sampah yang berawal dari sistem perwadhahan disetiap komponen sumber sampah, seperti rumah tangga, toko, pabrik dan lain-lain. Di daerah yang berpenduduk padat, pengumpulan sampah biasanya dilakukan dari rumah ke rumah dengan menggunakan gerobak sampah, kemudian dibuang ketempat pembuangan sementara (TPS). Untuk dipemukiman elite, pertokoan, pengumpulan sampah langsung oleh mobil pengangkut sampah untuk selanjutnya dibawah ketempat pembuangan akhir (TPA).
2. Pengolahan, yaitu proses pengelolaan sampah yang merupakan upaya mengurangi jumlah sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Proses pengolahan sampah dapat dilakukan melalui bebeapa cara yaitu: a) daur ulang, dan b) pengomposan. Hal ini dilakukan agar pengangkutan sampah untuk dibuang ketempat pembuangan akhir (TPA) tinggal sedikit.
3. Pengangkutan, yaitu proses pengangkutan yang dilakukan petugas kebersihan dengan menggunakan kendaraan/truk pengangkut sampah. Kebanyakan proses ini dimulai dari tempat penampungan sementara dan dapat pula dilakukan secara langsung dari sumber sampah seperti yang disebutkan diatas.

4. Pembuangan akhir, yaitu proses pembuangan sampah ketempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah mencakup persoalan yang sangat luas sebab bukan saja melibatkan masalah-masalah yang bersifat administratif dan manajerial tetapi juga menyangkut masalah teknis.

D. Kerangka Pikir

Kondisi lingkungan pemukiman di Kelurahan Bataragaru Kota Bau-Bau menggambarkan lingkungan permukiman yang tidak teratur, morat marit dan kurang bersih, terkesan rawan degradasi lingkungan dan rawan kesehatan, yang terindikasi dengan banyaknya sampah yang bertumpuk yang berasal dari sampah rumah tangga. Hal ini juga akibat dari proses pembangunan perkotaan sehingga mengubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia dan terjadi perubahan lingkungan sosial masyarakatnya.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu pekerjaan yang sangat berat bagi pemerintah dalam suatu lingkungan perkotaan. Banyak kendala dan rintangan yang muncul seputar pengelolaan sampah antara lain, aspek kelembagaan, aspek teknik operasional, aspek pembiayaan, aspek pengaturan, dan aspek peran serta masyarakat. Hal itu merupakan suatu sistem yang tidak bisa terpisahkan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya, untuk memaksimalkan pengelolaan sampah khususnya di Kelurahan

Batara guru maka aspek tersebut dimaksimalkan tercapai. Oleh karena itu partisipasi masyarakatlah yang harus diutamakan, karena selama ini kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara utuh dalam pengelolaan sampah kurang memadai, sementara disisi lain sampah adalah merupakan akibat dari kegiatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebersihan lingkungan terutama pengelolaan sampah pada hakekatnya diartikan adanya sikap tanggap masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Secara umum, proses pengelolaan sampah yang sering dilaksanakan selama ini dimulai dengan tahap pengumpulan, tahap pengolahan, tahap pengangkutan, dan tahap pembuangan akhir.

Lebih lanjut bahwa program keberhasilan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua, termasuk didalamnya masyarakat. Olehnya itu berhasil tidaknya program kebersihan lingkungan permukiman sangat tergantung dari partisipasi semua pihak (Pemerintah dan Masyarakat). Pemerintah sebagai motivator dalam program kebersihan lingkungan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab membuat aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan serta menyediakan berbagai macam fasilitas pendukung lainnya, namun harus disadari bahwa pemerintah juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan sehingga tidak mampu memenuhi secara keseluruhan.

Dengan kondisi seputar pengelolaan sampah tersebut maka dibutuhkan suatu upaya dalam perbaikan sampah, yakni dari segi kelembagaan dan peran serta masyarakat yang harus diefektifkan, keberhasilan pengelolaan sampah tersebut akan berlangsung efektif apabila ditunjang adanya keterpaduan antara pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat masyarakat sekitar. Pada tingkat struktural pemerintah telah melakukan upaya-upaya pengelolaan sampah di Kota Bau-Bau khususnya pada kelurahan Bataraguru dengan dibentuknya Dinas Kebersihan dan keindahan Kota Bau-bau sebagai instansi yang formal yang khusus menangani masalah sampah dan juga dibantu oleh instansi terkait seperti Badan Pengendalian Lingkungan Daerah Kota Bau-Bau, Camat, Lurah dan masyarakat setempat.

Namun perlu dipahami bahwa masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi apabila dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dilibatkan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan kontrol yang perlu terus ditingkatkan sehingga pada akhirnya akan menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 1
Kerangka Pikir

